



**INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(IPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPILING
KABUPATEN KENDAL**

Sekretariat : Jl Laut Jomblo No. 1 Desa Margorejo Kode Pos 51352

 PemdesMargorejo1@gmail.com  [Pemdes Margorejo](#)  [Pemdes_Margorejo](#)

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , bahwa Pemerintah Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dapat menjalankan roda Pemerintahan di tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada seluruh masyarakat dalam setiap 1 (satu) tahun Anggaran.

Selanjutnya dengan tersusunnya laporan ini, disamping suatu kewajiban juga menambah wawasan dan memperkaya data dalam rangka tertib administrasi di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan juga sarana untuk mengevaluasi masyarakat kepada Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini akan dapat memberikan informasi dan ruang terbuka kepada masyarakat dalam setiap program dan pelaksanaan kegiatan sehingga lebih mengerti dan mempertajam nilai transparansi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Informasi ini Informasi atas Penyelenggaraan Pemerintah desa selama 1 (satu) tahun Anggaran 2025 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah kami sampaikan kepada BPD.

Laporan ini merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan seorang Kepala Desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan mengerti, dan diharapkan akan memberikan informasi, saran kritk yang sifatnya membangun kepada pemerintah desa. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di masa yang akan datang.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga kerja sama yang baik dapat selalu kita bina demi terwujudnya program-program Pembangunan Desa mendatang.

Margorejo, 5 Januari 2026

Kepala Desa Margorejo



DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 1083);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan

Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal No 152);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 247)
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 No 35);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 29);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 No 30);
38. Peraturan Desa Margorejo No 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No 1 Tahun 2017);
39. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 Nomor 5);

40. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 No 2);
41. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 3);
42. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 5); sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 4);
43. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Muji Berkah" Margorejo (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 2);
44. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDesa "Muji Berkah" Margorejo (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 3);
45. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 5);
46. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 3);

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025 KEPADA MASYARAKAT**

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2023 - 2030) sesuai dengan kewenangan Desa Margorejo adalah sebagaimana tabel berikut ini :

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	7
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	0
		c. Peraturan Kepala Desa	13
		d. Keputusan Kepala Desa	44
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	1402
		1) Laki-laki	688
		2) Perempuan	714
		3) Jumlah Kepala Keluarga	534
		4) Jumlah Anggota Keluarga	868
		5) Jumlah Jiwa	1402
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	905
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) Belum/Tidak Bekerja	409
		2) Bidan	1
		3) Buruh Harian Lepas	125
		4) Buruh Nelayan/Perikanan	2
		5) Buruh Tani/Perkebunan	5
		6) Dokter	2
		7) Guru	3
		8) Karyawan Honorer	1
		9) Karyawan Swasta	66
		10) Kepala Desa	1
11) Mengurus Rumah Tangga	176		
12) Nelayan/Perikanan	39		
13) Pedagang	11		
14) Pegawai Negeri Sipil (Pns)	3		
15) Pelajar/Mahasiswa	140		
16) Pelaut	1		
17) Pembantu Rumah Tangga	1		
18) Pensiunan	1		
19) Perangkat Desa	4		
20) Perawat	2		

		21 Perdagangan	5
		22 Petani/Pekebun	128
		23 Peternak	2
		24 Tentara Nasional Indonesia (Tni)	2
		25 Tukang Batu	2
		26 Wiraswasta	270
3.	Pertanahan.	a. Luas Tanah:	173,82 Ha
		1) Bersertifikat	835 Ha
		2) Belum Bersertifikat	261 Ha
		3) Tanah Kas Desa	2 Ha
		b. Peruntukan:	
		1) Jalan	3 Km
		2) Tanah Ladang	2 Ha
		3) Bangunan Umum	1 Ha
		4) Perumahan	0
		5) Ruang Fasilitas Umum	1
		c. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	0
		2) Rawa-rawa	0
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	8
		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	7
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	7
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	2
		1) Jumlah Anggota	18
		2) Alat Pemadam kebakaran	2
		3) Jumlah Hansip Terlatih	18
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian criminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	2
		3) Jumlah Operasi Penertiban	0
		4) Jumlah Pos Keamanan	2
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	0
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw - Ada/Tidak	Ada
		2) PKK - Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	Ada
		5) LPM - Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan	Ya

	pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
	c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
	d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
	e. Lembaga Adat - Ada Tidak	Ada
	f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak

Rincian pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000	52.716.000	414.000
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.569.810	219.565.690	2.004.120
3	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa & P. Desa	15.098.400	15.088.884	9.516
4	Operasional Pemerintah Desa	51.024.590	49.596.956	1.427.634
5	Tunjangan BPD	31.200.000	31.200.000	0
6	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD	960.000	901.836	58.164
7	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD	20.757.000	20.461.727	295.273
8	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.290.000	16.290.000	
9	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	18.600.000	18.600.000	0
10	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	39.600.000	39.600.000	0
11	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	14.462.500	14.462.500	0
12	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.950.000	3.950.000	0
	JUMLAH	489.042.300	484.833.593	4.208.707

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Margorejo adalah sebagaimana tabel berikut ini :

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5
		b. Jembatan (Buah)	9
		c. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	
		2). Madrasah (Jumlah)	1
3). Kursus-Kursus (Jumlah)	1		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Bidan (Jumlah)	1
		b. Apotik (Jumlah)	1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	1
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	0
		b. Sarana Kesenian/ Kebudayaan:	
		1). Gedung Kesenian (Jumlah)	0
		c. Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	0
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	0
		d. Sarana Komunikasi:	
		1). Papan Pengumuman (Jumlah)	2
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Tempat Rekreasi (Jumlah)	3
		b. Saluran Irigasi (Jumlah)	2

Rincian pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISAS I	SALDO
1	Sub Bidang Pendidikan	34.800.000	34.800.000	0
2	Sub Bidang Kesehatan	81.695.016	77.325.400	4.369.616
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	914.849.608	912.495.000	2.354.608

4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	149.828.550	149.828.550	0
5	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi	9.000.000	9.000.000	0
6	Sub Bidang Kehutanan & Lingkungan Hidup	0	0	0
JUMLAH		914.849.608	912.495.000	2.354.608

C. Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Margorejo adalah sebagaimana tabel berikut ini :

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah		
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Berapa Kali)	1		
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1		
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa	2		
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1		
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2		
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	5		
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	5		
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa	0		
		2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	7
				b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	ada
c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya				
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya				
e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya				
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2		
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah	2		

		raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	1
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	2
		b. Majelis gereja (Jumlah)	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	2
		f. Remaja Gereja (jumlah)	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

Rincian pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO
1	Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	13.344.000	13.344.000	0
2	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan	23.000.000	0	23.000.000
3	Pembinaan PKK	14.486.326	14.213.636	272.690
JUMLAH		50.830.326	27.557.636	23.272.690

D. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Margorejo adalah sebagaimana tabel berikut ini :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	2
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	2
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	2

2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	2
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	2
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	2
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	2
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1

Rincian Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	161.234.500	161.234.500	0
JUMLAH		161.234.500	161.234.500	0

E. Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Margorejo. Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO
1	Bantuan Langsung Tunai	71.689.000	71.689.000	0
JUMLAH		71.689.000	71.689.000	0

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Margorejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun 2025 serta Realisasinya dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Margorejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun 2025 serta Realisasinya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V
PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam keberhasilan Pemerintahan Desa Pulutan melaksanakan berbagai kegiatan selama Tahun 2025 kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya, semoga amal baik dan upaya selama ini menjadi amal soleh dan hanya Allah yang dapat membalasnya.

Kami menyadari dan menerima semua bentuk kekurangan dan keterbatasan yang dapat kami berikan selama Tahun 2025, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan kekurangan disiplin ilmu tentang Kepemerintahan

Semoga tahun depan semakin baik dan adanya peningkatan dan perbaikan, tentunya diharapkan adanya dukungan dari semua pihak dan stakeholder yang ada, baik di dalam desa maupun diluar pemerintahan desa.

Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi warga Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Cepiring dan semua pihak pada umumnya.

Kami sebagai pelaku yakni atas nama Pemerintahan Desa menyampaikan permohonan maaf bilamana selama ini banyak sekali kesalahan dan kehilapan yang kami lakukan, dan kami sebagai manusia biasa tentunya tak lepas dari kehilapan dan salah, untuk itu mohon dibukakan pintu maaf dengan penuh ketulusan.

Wasalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Margorejo, 5 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.674.623.101,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	621.274,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.733.444.375,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>467.256.394,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	451.976.394,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.569.810,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	221.569.810,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.098.400,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.098.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.323.184,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.323.184,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.503.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.503.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.152.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.152.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	39.600.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.280.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.280.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.042.542.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.139.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	28.170.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.170.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.983.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.983.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	12.986.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.786.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	911.115.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	37.720.500,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.720.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	51.548.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	51.548.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	821.847.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	821.847.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.887.500,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	4.887.500,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.887.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>163.239.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.239.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.141.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.141.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	58.260.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	58.260.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	85.838.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	85.838.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>68.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS, DLL
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.741.437.894,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.993.519,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.993.519,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.993.519,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 5 Januari 2026

Penanggungjawab PKPKD



SUYOTO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.674.623.101,00	2.010.965.507,00	336.342.406,00	
4.2.1.	Dana Desa		705.083.000,00	705.083.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		87.644.101,00	148.647.507,00	61.003.406,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		281.896.000,00	267.235.000,00	(14.661.000,00)	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		600.000.000,00	890.000.000,00	290.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		621.274,00	26.910.274,00	26.289.000,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa		0,00	3.289.000,00	3.289.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank		621.274,00	621.274,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.733.444.375,00	2.096.075.781,00	362.631.406,00	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		467.256.394,00	489.042.300,00	21.785.906,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		451.976.394,00	470.629.800,00	18.653.406,00	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>		<i>53.130.000,00</i>	<i>53.130.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	<i>Belanja Pegawai</i>		<i>53.130.000,00</i>	<i>53.130.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>		<i>221.569.810,00</i>	<i>221.569.810,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.02	Belanja Pegawai	221.569.810,00	221.569.810,00	0,00	
1.1.03	<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	15.098.400,00	15.098.400,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	15.098.400,00	15.098.400,00	0,00	
1.1.04	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c</i>	48.323.184,00	51.024.590,00	2.701.406,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	48.323.184,00	51.024.590,00	2.701.406,00	
1.1.05	<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	34.503.000,00	34.560.000,00	57.000,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	34.503.000,00	34.560.000,00	57.000,00	
1.1.07	<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	0,00	16.290.000,00	16.290.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.290.000,00	16.290.000,00	
1.1.08	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	21.152.000,00	20.757.000,00	(395.000,00)	
1.1.08	Belanja Tidak Terduga	21.152.000,00	20.757.000,00	(395.000,00)	
1.1.91	<i>Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tar</i>	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.1.92	<i>Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan</i>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
1.2	<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	
1.2.01	<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	
1.2.01	Belanja Modal	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	
1.4	<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	15.280.000,00	14.462.500,00	(817.500,00)	
1.4.01	<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	15.280.000,00	14.462.500,00	(817.500,00)	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	14.462.500,00	(817.500,00)	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.042.542.000,00	1.190.173.174,00	147.631.174,00	
2.1	<i>Sub Bidang Pendidikan</i>	32.400.000,00	34.800.000,00	2.400.000,00	
2.1.01	<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	32.400.000,00	34.800.000,00	2.400.000,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	34.800.000,00	2.400.000,00	
2.2	<i>Sub Bidang Kesehatan</i>	85.139.000,00	81.695.016,00	(3.443.984,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, P		28.170.000,00	28.170.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa		28.170.000,00	28.170.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		43.983.000,00	43.983.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		43.983.000,00	43.983.000,00	0,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac		12.986.000,00	9.542.016,00	(3.443.984,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		12.786.000,00	9.542.016,00	(3.243.984,00)	
2.2.03	Belanja Modal		200.000,00	0,00	(200.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		911.115.500,00	914.849.608,00	3.734.108,00	
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa		37.720.500,00	37.720.500,00	0,00	
2.3.07	Belanja Barang dan Jasa		37.720.500,00	37.720.500,00	0,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per		51.548.000,00	51.548.000,00	0,00	
2.3.11	Belanja Modal		51.548.000,00	51.548.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel		821.847.000,00	825.581.108,00	3.734.108,00	
2.3.14	Belanja Barang dan Jasa		0,00	20.363.000,00	20.363.000,00	
2.3.14	Belanja Modal		821.847.000,00	805.218.108,00	(16.628.892,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		4.887.500,00	149.828.550,00	144.941.050,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak		0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa		0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		4.887.500,00	9.828.550,00	4.941.050,00	
2.4.15	Belanja Barang dan Jasa		4.887.500,00	9.828.550,00	4.941.050,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		0,00	50.830.326,00	50.830.326,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		0,00	13.344.000,00	13.344.000,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		0,00	13.344.000,00	13.344.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.344.000,00	13.344.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
3.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,00	14.486.326,00	14.486.326,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	0,00	14.486.326,00	14.486.326,00	
3.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.486.326,00	14.486.326,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	163.239.500,00	161.234.500,00	(2.005.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.239.500,00	161.234.500,00	(2.005.000,00)	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00	
4.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00	
4.2.04	5.3. Belanja Modal	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	85.838.000,00	83.833.000,00	(2.005.000,00)	
4.2.06	5.3. Belanja Modal	85.838.000,00	83.833.000,00	(2.005.000,00)	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	68.400.000,00	71.689.000,00	3.289.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	71.689.000,00	3.289.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	71.689.000,00	3.289.000,00	
5.3.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	71.689.000,00	3.289.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.741.437.894,00	1.962.969.300,00	221.531.406,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.993.519,00)	133.106.481,00	141.100.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	141.100.000,00	141.100.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	141.100.000,00	141.100.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	7.993.519,00	(133.106.481,00)	141.100.000,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

Margorejo, 5 Januari 2026

Perangungjawab PKPKD



SUYOTO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.010.965.507,00	2.008.547.387,00	2.418.120,00
	4.2.1.	Dana Desa	705.083.000,00	705.083.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	705.083.000,00	705.083.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	148.647.507,00	148.647.507,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	148.647.507,00	148.647.507,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	267.235.000,00	264.816.880,00	2.418.120,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	267.235.000,00	264.816.880,00	2.418.120,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.910.274,00	26.942.982,00	(32.708,00)
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00
	4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	621.274,00	2.033.982,00	(1.412.708,00)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	621.274,00	2.033.982,00	(1.412.708,00)
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	23.000.000,00	21.620.000,00	1.380.000,00
	4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	23.000.000,00	21.620.000,00	1.380.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	2.096.075.781,00	2.093.690.369,00	2.385.412,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	489.042.300,00	484.833.593,00	4.208.707,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	470.629.800,00	466.421.093,00	4.208.707,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	52.716.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	52.716.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	52.716.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	44.850.000,00	44.436.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.569.810,00	219.565.690,00	2.004.120,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	221.569.810,00	219.565.690,00	2.004.120,00
1.1.2	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	14.387.650,00	14.387.650,00	0,00
1.1.2	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	14.387.650,00	14.387.650,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	207.182.160,00	205.178.040,00	2.004.120,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	172.651.800,00	170.647.680,00	2.004.120,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	34.530.360,00	34.530.360,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.098.400,00	15.088.884,00	9.516,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	15.098.400,00	15.088.884,00	9.516,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	15.098.400,00	15.088.884,00	9.516,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.584.800,00	2.583.360,00	1.440,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.513.600,00	12.505.524,00	8.076,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.024.590,00	49.596.956,00	1.427.634,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.024.590,00	49.596.956,00	1.427.634,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	10.824.274,00	9.727.000,00	1.097.274,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.355.000,00	7.279.000,00	1.076.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.469.274,00	2.448.000,00	21.274,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.400.316,00	5.069.956,00	330.360,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.400.316,00	4.699.922,00	700.394,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	280.034,00	(280.034,00)
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	90.000,00	(90.000,00)
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	34.560.000,00	34.501.836,00	58.164,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	34.560.000,00	34.501.836,00	58.164,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	34.560.000,00	34.501.836,00	58.164,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawara	960.000,00	901.836,00	58.164,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.757.000,00	20.461.727,00	295.273,00
1.1.8	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.757.000,00	20.461.727,00	295.273,00
1.1.8	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.757.000,00	20.461.727,00	295.273,00
1.1.8	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.757.000,00	20.461.727,00	295.273,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.91	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil P	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Has	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.2		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>3.950.000,00</u>	<u>3.950.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.2.1	5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	<i>3.950.000,00</i>	<i>3.950.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>14.462.500,00</u>	<u>14.462.500,00</u>	<u>0,00</u>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.462.500,00	14.462.500,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.462.500,00	14.462.500,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>3.112.500,00</i>	<i>3.112.500,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
1.4.1	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</i>	<i>8.250.000,00</i>	<i>8.250.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.1	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.190.173.174,00</u>	<u>1.183.448.950,00</u>	<u>6.724.224,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>34.800.000,00</u>	<u>34.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>34.800.000,00</i>	<i>34.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>81.695.016,00</u>	<u>77.325.400,00</u>	<u>4.369.616,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	28.170.000,00	28.170.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.170.000,00	28.170.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</i>	<i>16.170.000,00</i>	<i>16.170.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.1	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	16.170.000,00	16.170.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	43.983.000,00	41.167.900,00	2.815.100,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.983.000,00	41.167.900,00	2.815.100,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	43.983.000,00	41.167.900,00	2.815.100,00
2.2.2	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	31.983.000,00	29.167.900,00	2.815.100,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.542.016,00	7.987.500,00	1.554.516,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.542.016,00	7.987.500,00	1.554.516,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.592.016,00	1.037.500,00	1.554.516,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.492.016,00	937.500,00	1.554.516,00
2.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.2.3	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.3	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.2.3	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	914.849.608,00	912.495.000,00	2.354.608,00
2.3.7		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	37.720.500,00	37.300.000,00	420.500,00
2.3.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.720.500,00	37.300.000,00	420.500,00
2.3.7	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	37.720.500,00	37.300.000,00	420.500,00
2.3.7	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	37.720.500,00	37.300.000,00	420.500,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan	51.548.000,00	51.548.000,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	51.548.000,00	51.548.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	51.548.000,00	51.548.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	8.005.000,00	8.005.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	39.643.000,00	39.643.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	825.581.108,00	823.647.000,00	1.934.108,00
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.363.000,00	20.363.000,00	0,00
2.3.14	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.363.000,00	14.363.000,00	0,00
2.3.14	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00
2.3.14	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
2.3.14	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.14	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.14	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	805.218.108,00	803.284.000,00	1.934.108,00
2.3.14	5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	<i>805.218.108,00</i>	<i>803.284.000,00</i>	<i>1.934.108,00</i>
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	158.075.000,00	158.075.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	628.529.500,00	626.793.500,00	1.736.000,00
2.3.14	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	15.313.608,00	15.115.500,00	198.108,00
2.3.14	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>149.828.550,00</u>	<u>149.828.550,00</u>	<u>0,00</u>
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.890.000,00</i>	<i>1.890.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</i>	<i>138.110.000,00</i>	<i>138.110.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	138.110.000,00	138.110.000,00	0,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	9.828.550,00	9.828.550,00	0,00
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.828.550,00	9.828.550,00	0,00
2.4.15	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</i>	<i>9.828.550,00</i>	<i>9.828.550,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.15	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	9.828.550,00	9.828.550,00	0,00
2.6		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>9.000.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.6.3	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.6.3	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.830.326,00</u>	<u>27.557.636,00</u>	<u>23.272.690,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>13.344.000,00</u>	<u>13.344.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.344.000,00	13.344.000,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.344.000,00	13.344.000,00	0,00
3.1.1	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</i>	<i>13.344.000,00</i>	<i>13.344.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	13.344.000,00	13.344.000,00	0,00
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>23.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000.000,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3.2.3	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>23.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000.000,00</i>
3.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>14.486.326,00</u>	<u>14.213.636,00</u>	<u>272.690,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3		Pembinaan PKK	14.486.326,00	14.213.636,00	272.690,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.486.326,00	14.213.636,00	272.690,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.286.326,00	7.113.636,00	172.690,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.986.326,00	1.813.636,00	172.690,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	7.200.000,00	7.100.000,00	100.000,00
3.4.3	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	7.200.000,00	7.100.000,00	100.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>161.234.500,00</u>	<u>161.234.500,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>161.234.500,00</u>	<u>161.234.500,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
4.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	19.141.500,00	19.141.500,00	0,00
4.2.4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00
4.2.4	5.3.	Belanja Modal	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin	58.260.000,00	58.260.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	57.960.000,00	57.960.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	83.833.000,00	83.833.000,00	0,00
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	83.833.000,00	83.833.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin	83.833.000,00	83.833.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	450.000,00	450.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	23.905.000,00	23.905.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	59.078.000,00	59.078.000,00	0,00
4.2.6	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	400.000,00	400.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>71.689.000,00</u>	<u>71.689.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>71.689.000,00</u>	<u>71.689.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.962.969.300,00	1.928.763.679,00	34.205.621,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	133.106.481,00	164.926.690,00	(31.820.209,00)
	6.	PEMBIAYAAN			

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.993.519,00	7.993.519,00	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(133.106.481,00)	(133.106.481,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	31.820.209,00	(31.820.209,00)

Margorejo, 5 Januari 2026

Penanggungjawab PKPKD



SUYOTO